

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di sektor formal. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan UMKM tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja. Seperti yang dinyatakan oleh (Sari, Prabowo, 2021) "UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang mampu bertahan dalam berbagai kondisi krisis."

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama dalam struktur perekonomian Indonesia karena kontribusinya yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar di berbagai sektor produktif. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja di sektor formal, sehingga keberadaannya menjadi faktor penopang stabilitas ekonomi. Besarnya kontribusi tersebut menegaskan bahwa UMKM tidak hanya berperan sebagai penggerak aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga keseimbangan sosial ekonomi masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional, keberadaan

UMKM juga berfungsi sebagai sarana distribusi pendapatan yang relatif merata dibandingkan sektor ekonomi berskala besar. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sari dan Prabowo (2021) yang menyebutkan bahwa UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang mampu bertahan dalam berbagai kondisi krisis ekonomi. Ketahanan tersebut menunjukkan bahwa sektor UMKM memiliki fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan dinamika ekonomi global maupun domestik. Oleh karena itu, penguatan sektor UMKM menjadi agenda strategis dalam kebijakan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah.

Transformasi digital menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan daya saing UMKM di tengah perkembangan ekonomi berbasis teknologi yang semakin cepat dan kompetitif. Kerangka regulasi yang mendukung transformasi ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan teknologi. Regulasi tersebut mengatur tata kelola transaksi elektronik serta perlindungan data sehingga menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya bagi pelaku usaha. Suryanto et al. (2022) menyatakan bahwa revisi regulasi ITE tidak hanya memperkuat perlindungan data pengguna, tetapi juga mendorong inovasi pelayanan digital di sektor publik. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, pemerintah memiliki landasan yang kuat untuk mengembangkan berbagai platform digital dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini termasuk pengembangan aplikasi pelayanan publik yang bertujuan memperluas akses pasar serta meningkatkan efisiensi transaksi UMKM. Dengan demikian, transformasi

digital menjadi instrumen kebijakan yang strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi berbasis teknologi.

Pada level pemerintahan daerah, kebijakan digitalisasi diwujudkan melalui Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menjadi pedoman integrasi layanan publik. Kebijakan ini menekankan pentingnya pertukaran data dan koordinasi antar perangkat daerah guna meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Implementasi SPBE memungkinkan proses administrasi pemerintahan menjadi lebih efisien, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan publik. Kartika et al. (2023) menjelaskan bahwa penerapan SPBE yang sistematis mampu meningkatkan sinergi kelembagaan serta mempercepat pengambilan keputusan berbasis data. Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah daerah memiliki kerangka kerja yang jelas dalam mengembangkan layanan digital yang terintegrasi. Hal ini juga membuka peluang bagi pemanfaatan teknologi dalam mendukung pengembangan sektor ekonomi lokal, termasuk UMKM. Oleh karena itu, kebijakan SPBE menjadi fondasi penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan digital yang adaptif.

Secara statistik, dominasi UMKM dalam struktur ekonomi nasional tercermin dari jumlah unit usaha yang mencapai sekitar 65,5 juta pada tahun 2019 dengan pertumbuhan sebesar 1,98% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah tersebut mencakup sekitar 99% dari total pelaku usaha di Indonesia sehingga menunjukkan bahwa UMKM merupakan sektor ekonomi dengan basis pelaku paling luas. Dari total tersebut, sekitar 64,6 juta unit merupakan usaha mikro, sekitar 798,7 ribu unit usaha kecil, serta sekitar 65,5 ribu unit usaha menengah.

Besarnya jumlah unit usaha tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja serta mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, persebaran UMKM yang relatif merata di berbagai wilayah turut berkontribusi pada pemerataan pembangunan ekonomi daerah. Kondisi ini menjadikan UMKM sebagai sektor prioritas dalam kebijakan pembangunan ekonomi inklusif. Oleh karena itu, penguatan kapasitas UMKM menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia yang mencapai sekitar 61,97% semakin mempertegas posisi strategis sektor ini dalam struktur ekonomi nasional. Selain berkontribusi pada aktivitas ekonomi domestik, UMKM juga berperan dalam meningkatkan nilai ekspor produk lokal terutama pada sektor kreatif, kuliner, dan kerajinan. Peran tersebut menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya berorientasi pada pasar lokal, tetapi juga memiliki potensi bersaing di pasar global. Alfrian dan Pitaloka (2020) menyimpulkan bahwa UMKM mampu mempertahankan pertumbuhan positif bahkan dalam situasi krisis ekonomi seperti yang terjadi pada tahun 1998 dan 2012. Ketahanan tersebut menunjukkan fleksibilitas model bisnis UMKM yang mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi. Hal ini menjadi indikator bahwa UMKM memiliki daya tahan yang relatif lebih kuat dibandingkan sektor usaha berskala besar. Dengan demikian, pengembangan UMKM berbasis inovasi menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Meskipun memiliki peran strategis, UMKM masih menghadapi berbagai

kendala struktural yang menghambat optimalisasi kinerjanya dalam perekonomian. Kendala tersebut meliputi keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan, rendahnya kapasitas manajerial, serta kesulitan dalam memperluas jaringan pemasaran. Pandemi COVID-19 turut memperburuk kondisi tersebut dengan menurunnya daya beli masyarakat dan berubahnya pola konsumsi menuju transaksi digital. Mukhtar dan Rahayu (2019) menekankan bahwa pemanfaatan teknologi keuangan dan platform digital menjadi solusi penting untuk mempertahankan keberlangsungan usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan bagi pelaku UMKM. Tanpa adaptasi terhadap teknologi, UMKM berisiko tertinggal dalam persaingan pasar yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang mampu mempercepat digitalisasi UMKM secara inklusif.

Dalam perspektif pembangunan sosial ekonomi, kemandirian masyarakat menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup. Mulyadi (2018) menyatakan bahwa kemandirian ekonomi tercermin dari kemampuan masyarakat dalam menciptakan usaha produktif serta berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Perkembangan UMKM menjadi salah satu bentuk nyata dari upaya masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup secara mandiri. Oleh karena itu, pemahaman terhadap potensi dan tantangan UMKM menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan ekosistem usaha yang kondusif. Kolaborasi tersebut memungkinkan terciptanya dukungan pembiayaan, pelatihan, serta akses pasar yang lebih luas bagi pelaku

UMKM. Dengan demikian, penguatan UMKM tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari upaya digitalisasi ekonomi daerah, pemerintah mengembangkan aplikasi BelabeliKu sebagai platform pemasaran digital bagi UMKM di Kabupaten Kulon Progo. Aplikasi ini dirancang untuk memperluas akses pasar, meningkatkan visibilitas produk lokal, serta memfasilitasi interaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Melalui platform tersebut, UMKM diharapkan mampu meningkatkan daya saing serta memperluas jangkauan distribusi produknya. Namun, keberhasilan implementasi aplikasi tidak hanya bergantung pada aspek teknis sistem, tetapi juga pada tingkat koordinasi antar pihak yang terlibat. Setiawan dan Lestari (2019) menekankan bahwa keberhasilan inovasi digital sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah, pengembang teknologi, dan pengguna. Tanpa koordinasi yang efektif, potensi aplikasi digital tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif menjadi kunci dalam pengembangan platform digital UMKM.

Konsep interoperabilitas menjadi faktor penting dalam memastikan sistem digital dapat berjalan secara efektif dan terintegrasi dalam suatu ekosistem pelayanan publik. Jaeger dan Bertot (2010) mendefinisikan interoperabilitas sebagai kemampuan sistem dan organisasi untuk bekerja sama serta bertukar informasi secara efisien. Dalam konteks aplikasi BelabeliKu, interoperabilitas memungkinkan integrasi antara kebijakan pemerintah, kebutuhan pengguna, dan teknologi yang digunakan. Integrasi tersebut berperan dalam meningkatkan kualitas

layanan serta mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data. Keberhasilan sistem digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh koordinasi antar aktor yang terlibat. Dengan interoperabilitas yang baik, potensi konflik kepentingan dapat diminimalkan melalui komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, interoperabilitas menjadi elemen kunci dalam keberhasilan implementasi platform digital pemerintahan.

Konsep e-government merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik. Implementasi e-government tidak hanya berorientasi pada digitalisasi layanan, tetapi juga pada transformasi proses administrasi, peningkatan transparansi, serta efisiensi pengambilan keputusan. Menurut Dahlawi, Syahputra, Khalil, dan Al Munadi (2023), penerapan smart governance sebagai bagian dari e-government berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui integrasi sistem, partisipasi masyarakat, dan tata kelola yang lebih responsif. Hal ini menunjukkan bahwa e-government merupakan pendekatan strategis yang memungkinkan pemerintah menghadirkan layanan yang lebih efektif dan terkoordinasi.

Selain itu, pengembangan e-government juga berkaitan erat dengan kesiapan institusi, kapasitas fiskal, serta kepemimpinan digital dalam organisasi pemerintahan. Bastian, Effendi, Susanto, Unggara, dan Sumiyana (2022) menegaskan bahwa transformasi menuju pemerintahan digital memerlukan dukungan kebijakan, model pengambilan keputusan yang adaptif, serta kemampuan organisasi dalam mengelola inovasi teknologi. Sejalan dengan itu, Cahyarini (2021)

menyatakan bahwa kepemimpinan digital menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan implementasi layanan publik berbasis teknologi. Dengan demikian, e-government dapat dipahami sebagai suatu sistem tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang menekankan integrasi proses, peningkatan kinerja pelayanan, serta kolaborasi antar unit pemerintahan secara berkelanjutan.

Peran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo sangat strategis dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan UMKM melalui berbagai program pemberdayaan. Program tersebut meliputi pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta fasilitasi akses pasar bagi pelaku UMKM. Melalui fungsi koordinatifnya, dinas ini berperan sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan pelaku usaha. Prasetya et al. (2023) menyatakan bahwa keterlibatan aktif pemerintah daerah mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi UMKM. Dukungan kebijakan yang tepat dapat mempercepat proses adaptasi teknologi di kalangan pelaku usaha. Selain itu, peran fasilitasi dinas membantu memastikan implementasi program berjalan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, keberadaan institusi ini menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengembangan UMKM berbasis digital.

Secara konseptual, mencakup seluruh pihak yang memiliki kepentingan dalam pengembangan aplikasi digital mulai dari pengguna hingga pembuat kebijakan. Freeman (1984) menegaskan bahwa keberhasilan organisasi sangat bergantung pada kemampuannya mengakomodasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Dalam konteks aplikasi BelabeliKu, pendekatan memastikan bahwa sistem yang dikembangkan mampu menjawab kebutuhan nyata pelaku usaha.

Keterlibatan seluruh aktor memungkinkan terciptanya kebijakan dan teknologi yang saling mendukung. Pendekatan ini juga membantu meminimalkan kesenjangan antara perencanaan dan implementasi kebijakan digital. Dengan memahami peran masing-masing stakeholder, proses pengembangan sistem dapat berjalan lebih efektif. Oleh karena itu, teori menjadi landasan konseptual penting dalam penelitian ini.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, pengembangan aplikasi BelabeliKu dapat dipahami sebagai proses inovasi yang tidak hanya bersifat teknologis tetapi juga kolaboratif. Keberhasilan implementasinya sangat dipengaruhi oleh tingkat interoperabilitas yang terlibat dalam proses pengembangan dan pemanfaatannya. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis bagaimana interoperabilitas tersebut terbentuk serta bagaimana peran masing-masing aktor dijalankan masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji faktor pendukung dan penghambat interoperabilitas dalam konteks platform digital UMKM di tingkat daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi melalui kajian yang lebih komprehensif. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika kolaborasi dalam pengembangan aplikasi BelabeliKu. Dengan demikian, hasil penelitian dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan dalam memperkuat ekosistem digital UMKM di daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka pertanyaan penelitian

dirumuskan secara spesifik sebagai berikut:

1. Bagaimana interoperabilitas e-government dalam pengembangan UMKM di Kulon Progo?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat interoperabilitas e-government dalam pengembangan UMKM di Kulon Progo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Bagian ini menjelaskan tujuan yang ingin dicapai serta manfaat yang diharapkan dari penelitian, baik secara akademis maupun praktis.

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. **Menganalisis bentuk dan tingkat interoperabilitas e-government dalam pengembangan UMKM di Kulon Progo.**

Tujuan ini langsung menjawab pertanyaan pertama, dengan menilai bagaimana integrasi sistem, proses, dan data berjalan dalam praktik.

2. **Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat interoperabilitas e-government dalam pengembangan UMKM di Kulon Progo.**

Fokusnya pada aspek teknis, organisasi, regulasi, dan proses yang memengaruhi keberhasilan integrasi layanan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

1. Menambah referensi ilmiah terkait digitalisasi UMKM dan penerapan teori

pemangku kepentingan.

2. Menjadi bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan pengembangan ekonomi digital daerah.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan pengembangan UMKM berbasis digital.
2. Menjadi bahan evaluasi bagi pengelola aplikasi dalam meningkatkan kualitas layanan.
3. Memberikan informasi bagi pelaku UMKM mengenai pemanfaatan platform digital untuk pemasaran produk.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

➤ BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

➤ BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, dan hipotesis (jika menggunakan pendekatan kuantitatif).

➤ BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, serta teknik analisis

data.

➤ **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menyajikan hasil pengolahan data, analisis temuan, serta pembahasan yang dikaitkan dengan teori dan penelitian terdahulu.

➤ **BAB V PENUTUP**

Berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian.

